

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUALAN MINUMAN KERAS SECARA *ILEGAL* DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**(Studi Putusan Nomor: 1148/Pid.B/2021/PN.Tjk)**

**Oleh  
EKA SALSAL DEWI**

Penjualan minuman keras secara *ilegal* dalam penegakan hukumnya masih dikatakan belum maksimal penerapan serta pelaksanaannya. Hal itu diperkuat dengan data penjualan minuman keras secara *ilegal* pada Kota Bandar Lampung sepanjang tahun 2021 sebanyak 13.296 miras hingga tahun 2024 sebanyak 1.021 miras dan mengenai proses yang sampai pada tahap pemidanaan hanya pada tahun 2021 yakni berdasarkan Putusan Nomor 1148/Pid.B/2021/PN.Tjk dengan pidana penjara hanya 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dilakukan sebelumnya dan dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2,000.00 (dua ribu rupiah). Hal itu tidak dapat membantu menekan angka tingginya penjualan minuman keras secara *ilegal* di Kota Bandar Lampung dengan hambatan penegakan hukum saat ini. Oleh karena itu, adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap penjualan minuman keras secara *ilegal* di Kota Bandar Lampung, dan apa sajakah faktor penghambat penegakan hukum pidana pada penjualan minuman keras secara *ilegal* di Kota Bandar Lampung.

Metode penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dengan data primer yang diperoleh dari wawancara dan sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian dan pembahasan dilakukan di Kepolisian Polresta Bandar Lampung serta wawancara dengan Kepolisian pada Satuan Reserse Kriminal pada Polsek Teluk Betung Selatan. Prosedur Pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dengan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa penegakan hukum pidana terhadap penjualan minuman keras secara *illegal* adalah melalui upaya dengan diterapkan penegakan hukum pidana dengan represif. Adapun tahapan yang dilakukan dengan tahap aplikasi oleh kepolisian Polresta Bandar Lampung dengan melakukan tahap penyidikan hingga dengan pemidanaan berdasarkan Putusan Nomor 1148/Pid.B/2021/PN.Tjk. Hal tersebut disebabkan adanya faktor penghambat berupa hambatan dari substansi hukum, penegak hukum, masyarakat, sarana dan prasarana, kebudayaan. Hambatan tersebut menyebabkan kurangnya jera yang diakibatkan, personil kepolisian tersebut terbatas yang menyebabkan sulit untuk melakukan pengawasan secara intensif di sejumlah wilayah Kota Bandar Lampung dalam melakukan penegakan hukum salah satunya unit Reserse Kriminal (Reskrim), anggaran biaya yang terbatas menyebabkan kepolisian Polresta Bandar Lampung dalam melakukan penyelidikan, dan penyidikan pada penjualan minuman keras secara *illegal* di Kota Bandar Lampung tidak optimal dan hanya satu perkara saja yang sampai pada tahap pemidanaan yang menyebabkan masih banyak wilayah Kota Bandar Lampung menjual minuman keras diluar aturan hukum.

Saran dari penelitian ini adalah diharapkan Polresta Bandar Lampung mengatasi hambatan pada penegakan hukum dalam hal meningkatkan pemahaman mengenai peraturan penjualan minuman keras secara *illegal*, mengoptimalkan penegakan hukum secara aplikasi ataupun eksekusi guna dapat memberikan efek jera bagi seseorang yang melakukan tindak pidana atau kejahatan penjualan minuman keras secara *illegal*.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana, Penjualan Minuman Keras Secara *Illegal***

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT ILLEGAL SALE OF LIQUOR IN BANDAR LAMPUNG CITY**

**(Study Decision Number: 1148/Pid.B/2021/PN.Tjk)**

**By  
EKA SALSA DEWI**

*Sale of liquor online illegal In terms of law enforcement, it is still said that implementation and implementation has not been maximized. This is reinforced by data on sales of alcoholic beverages illegal in the City of Bandar Lampung throughout 2021 there were 13,296 alcoholic drinks until 2024 there were 1,021 alcoholic drinks and regarding the process that reached the criminalization stage only in 2021, namely based on Decision Number 1148/Pid.B/2021/PN.Tjk with a prison sentence of only 7 (seven ) months minus the previous detention period and charged to pay the respective court costs in the amount Rp. 2,000.00 (two thousand rupiah). This cannot help reduce the high number of sales of alcoholic beverages illegal in Bandar Lampung City with current law enforcement obstacles. Therefore, the problem in this research is how to enforce criminal law against the sale of alcoholic beverages illegal in Bandar Lampung City, and what are the factors inhibiting criminal law enforcement on the sale of alcoholic beverages illegal in Bandar Lampung City.*

*This research method was carried out using a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The data used is primary data obtained from interviews and secondary data obtained from literature study. Research and discussions were carried out at the Bandar Lampung Police as well as interviews with the Police at the Criminal Investigation Unit at the Teluk Betung Selatan Police. Procedures for collecting data in writing this research were by means of literature study with field studies, then the data was analyzed qualitatively.*

***Eka Salsa Dewi***

*Based on the results of research and discussion, criminal law enforcement regarding the sale of alcoholic beverages illegal is through efforts to implement repressive criminal law enforcement. The stages carried out are the application stage by the Bandar Lampung Police, carrying out the investigation stage up to the punishment based on Decision Number 1148/Pid.B/2021/PN.Tjk. This is due to the existence of inhibiting factors in the form of obstacles from legal substance, law enforcement, society, facilities and infrastructure, culture. These obstacles cause a lack of deterrence, the police personnel are limited which makes it difficult to carry out intensive supervision in a number of areas of Bandar Lampung City in carrying out law enforcement, one of which is the Criminal Investigation Unit (Reskrim), the limited budget causes the Bandar Lampung Police to carry out investigations, and investigations into the sale of alcoholic beverages illegal in Bandar Lampung City it is not optimal and only one case has reached the criminalization stage which has resulted in many areas of Bandar Lampung City still selling liquor outside the law.*

*The suggestion from this research is that it is hoped that the Bandar Lampung Police will overcome obstacles to law enforcement in terms of increasing understanding of the regulations for the sale of liquor online. illegal, optimizing law enforcement by application or execution in order to provide a deterrent effect for someone who commits a crime or crime of selling alcoholic beverages illegal.*

***Keywords: Criminal Law Enforcement, Crime, Sales of Alcoholic Drinks Illegal***